

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 18 PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016
TERHADAP PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
MELINDUNGI PROFESI NOTARIS
(Studi Kasus di Kota Bengkulu)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

CHATERIN ISTARINA
NIM. 156010202111049

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

RINGKASAN

Chaterine Istarina, NIM 156010202111049, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 13 Juli 2017, **EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 18 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TERHADAP PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI PROFESI NOTARIS (Studi Kasus di Kota Bengkulu)**, Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H; Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh substansi Pasal 18 ayat 1 khususnya huruf b yang mana tidak secara jelas pengaturan mengenai tindakan atau perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh MKN selanjutnya bilamana telah menyetujui permintaan pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, yang seolah-olah MKN tidak lagi memiliki tanggungjawab penuh yang berkelanjutan terhadap jalannya proses tersebut. Menurut Penulis, bilamana MKN telah memberikan persetujuan bagi Notaris guna hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, maka sudah seharusnya MKN diwajibkan dan aktif untuk turut melakukan pendampingan hukum kepada profesi Notaris guna memberikan perlindungan hukum serta pembelaan lainnya terkait dengan akta-akta yang telah dibuat hingga persoalan hukum yang dihadapi tersebut tuntas, apabila tidak dilakukan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan tugas dan fungsi MKN melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 18 ayat 2 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimanakah efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu dan Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu terbukti masih belum optimal. Mengingat perlindungan hukum yang diberikan oelh MKN wilayah Bengkulu hanyalah sebatas memberikan persetujuan dan penolakan atas pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, tanpa adanya pendampingan hukum lebih lanjut. Padahal apabila kita cermati lebih lanjut Pasal 18 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa tugas yang wajib dilakukan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris adalah menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan

profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Selanjutnya, Pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum pada prakteknya hingga saat ini masih belum optimal, sehingga guna mengoptimalkan penerapan aturan tersebut perlu kiranya untuk menambahkan frasa ayat c dan d pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu : c. dalam rangka memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan pendampingan hukum kepada Notaris tersebut hingga proses hukum selesai; d. dalam rangka memberikan penolakan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut kepada publik demi menjaga nama baik Notaris yang bersangkutan.

Kata Kunci : Efektifitas hukum, Perlindungan hukum, Peran Majelis Kehormatan Notaris, Profesi Notaris.

SUMMARY

Chaterine Istarina, NIM 156010202111049, *Magister of Notary Program, Faculty of Law, Brawijaya University Malang, 13 July 2017, EFFECTIVENESS OF APPLICATION ARTICLE 18 REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 7 YEAR 2016 TO THE ROLE OF THE NOTARIS HONORARY ASSEMBLY IN PROTECTING NOTARIS PROFESSION (Case Study in Bengkulu City), Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H; Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H.*

The background of this is based on the the substance of Article 18 paragraph 1, especially letter b, which is not clearly the regulation concerning any action or legal protection which may be given by the MKN further when it has approved the request of the notary public to attend the investigation, prosecution and judicial process , As if MKN no longer has full, ongoing responsibility for the process. According to the Author, if the MKN has given approval for the Notary to be present in the investigation, prosecution, and or judicial process, then MKN should be obliged and active to participate in legal assistance to the Notary profession to provide legal protection and other defense related to deeds Has been made until the legal matter faced is complete, if not done, then it has been contradictory with the duties and functions of the MKN conducts guidance in order to safeguard the dignity and honor of a Notary in running his profession and provide protection to Notary in relation to the obligation of Notary to conceal the contents of the deed As set forth in Article 18 paragraph 2 PM of Law and Human Rights No. 7 of 2016.

This research raises the formulation of the problem How effective the application of Article 18 PM of Law and Ham Number 7 of 2016 on the role of MKN in protecting the Notary profession in Bengkulu city and How is the regulation about the protection of the Notary profession given by MKN to guarantee legal certainty in the future. This study was prepared using empirical juridical research method. Based on the results of research has been known that the effectiveness of the application of Article 18 PM Law and Ham No. 7 of 2016 Against the role of MKN in protecting the Notary profession in the city of Bengkulu proved still not optimal. Given the legal protection provided by MKN in Bengkulu area is merely to give approval and rejection of the calling of Notary submitted by the investigator, without any further legal assistance. Yet if we look further at Article 18 paragraph 2, it can be seen that the duties that must be done by the MKN in protecting the Notary's profession is to maintain the dignity and honor of Notary in running profession of his position and provide protection to the Notary in relation to the obligation of Notary to conceal the contents of the Deed. Furthermore, the regulation on the protection of the Notary profession granted by MKN to ensure legal certainty in practice is still not optimal, so in order to optimize the application of the rule it is necessary to add the phrase c and d of Article 18 PM of Law and Human Rights Number 7 of 2016 , Namely: c. In order to give the approval of the Notary's invitation to be present in the investigation,

prosecution and judicial process, the Regional Notary Public Notary shall provide legal assistance to the Notary until the legal process is completed; D. In order to give refusal to invite Notary to be present in investigation, prosecution and judicial process, the Regional Notary Public Notary shall keep confidential all matters relating to the call to the public in order to maintain the good name of the Notary concerned.

Key word : Legal effectiveness, Legal protection, Role of Notary Publicity Council, Notary Profession.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Efektifitas Penerapan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”.

Adapun Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). Bahwa dalam proses penyelesaiannya, Penulis telah melibatkan banyak pihak, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, tenaga serta pikiran-pikiran guna membimbing, memotivasi serta dengan kesabaran hati telah mengarahkan Penulis hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran, Ide, arahan serta memotivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik

kepada Penulis selama mengemban ilmu serta dalam proses penyelesaian Tesis ini.

6. Orang tua Penulis, yang tercinta Bapak Laurensius Oswari, S.E dan yang tercinta Ibu Agnes Veronica Misliani atas segala kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik secara materiil maupun moril serta restu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Kakak dan adik-adik yang Penulis hormati dan selalu Penulis sayangi, Daniel Emerson Mauryan Aveno Oswari, S.H, Robertus Ronny Oswari, dan Albertus Robby Oswari yang kesemuanya senantiasa telah memberikan inspirasi, nasihat, semangat, serta doa yang tiada henti untuk Penulis.
8. Yohannes Harry Nugroho, S.E, serta para sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa untuk Penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Khususnya bagi kelas C angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan, ide, saran serta kritik dalam penulisan Tesis ini.
10. Serta pihak-pihak lain yang telah turut membantu terselesaikannya penulisan Tesis ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya, Penulis berharap adanya masukan, kritik serta saran guna kesempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penulisan Tesis ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum pada Tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman demi penelitian selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan-Nya, Amin.

Malang, 10 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum	12
1.6.2. Teori Efektifitas Hukum	17
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1 Jenis Penelitian	22
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	26
1.7.3. Lokasi Penelitian	23
1.7.4. Jenis dan Sumber Data	25
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	26
1.7.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	30
2.1.1. Sejarah Terbentuknya Notaris di Eropa.....	30

2.1.2. Sejarah Terbentuknya Notaris di Belanda dan Indonesia	32
2.1.3. Pengertian Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	37
2.2. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	43
2.2.1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Peraturan Perundang-Undangan	43
2.2.2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris	45
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	47
2.3.1. Pengertian Penyidikan	47
2.3.2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
3.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	54
3.1.1. Gambaran Umum Kota Bengkulu	54
3.1.2. Kota Bengkulu Sebagai Salah Satu Kota Berkembang	56
3.2. Efektifitas Penerapan Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran MKN Dalam Melindungi Profesi Notaris di Kota Bengkulu	60
3.2.1. Perlindungan Terhadap Profesi Notaris.....	60
3.3. Pengaturan Tentang Perlindungan Profesi Notaris yang Diberikan Oleh MKN Guna Menjamin Kepastian Hukum Dimasa yang Akan Datang	77
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu, tahun 2010-2016	58

Tabel 2. Data Notaris yang dipanggil Penyidik	68
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis tersebut dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya akan profesi Notaris ini.¹

Akan tetapi, meskipun tugas dan fungsi dari kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta selalu berkaitan dengan aspek hukum perdata, bukan berarti Notaris tersebut terbebas sepenuhnya dari “jeratan” pidana yang dapat membelenggunya sewaktu-waktu. Hingga saat ini tidak sedikit dari Notaris yang karena kelalaian menjalankan tugas dan fungsinya dalam membuat akta kemudian menimbulkan pelanggaran hukum yang mengharuskan bagi penyidik melakukan tugas dan tupoksinya dalam mencari alat-alat bukti guna membenarkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum tersebut, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan;

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 1-4.

bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: *tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.*² Sehingga dapat disimpulkan pelanggaran hukum merupakan suatu tindakan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Mengingat akan rentannya profesi Notaris dari “jeratan” hukum yang dapat membelenggunya sewaktu-waktu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka urgensi akan hadirnya suatu lembaga atau badan yang dapat melindungi profesi Notaris akan sangat diharapkan.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), maka perlindungan hukum bagi profesi Notaris khususnya dalam proses penyidikan tersebut telah diatur di dalam Pasal 66³, yang dimana perlindungan hukum bagi profesi Notaris berdasarkan Pasal 66 UUJN tersebut diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disingkat MKN).

² **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), hlm. 809

³ (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Awal mula terbentuknya MKN itu sendiri telah melalui perdebatan yang panjang. Dalam sejarah perkembangannya, lahirnya MKN didahului oleh terbentuknya Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat MPD) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai peraturan terdahulu, namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 yang mencabut pasal 66 ayat 1 atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang dimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris berbunyi:

“Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Maka demi hukum MPD tidak lagi berwenang dalam memberikan persetujuan dalam hal pemanggilan Notaris guna proses penyidikan, karena kewenangan tersebut kini telah diberikan sepenuhnya kepada MKN sebagai lembaga atau badan yang dapat melindungi profesi Notaris. Hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat dan dari berbagai kalangan Notaris telah sangat merugikan hak para Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dan semakin membebani tugas para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik. Dengan adanya putusan tersebut, maka banyak timbul kegelisahan dari

para praktisi Notaris, karena dengan demikian, Hak istimewa untuk dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama negara menjadi “hilang”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses peradilan guna mengambil dokumen yang telah disimpan oleh Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tersebut tidak perlu kiranya untuk meminta persetujuan dari MPD . Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDRI 1945). Menurut Mahkamah Konstitusi, perlakuan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin pasal 27 ayat (1) dan Pasal 18D ayat (3) UUDRI 1945.

Mahkamah Konstitusi pada saat itu menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara. Dengan begitu akan terhindar adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula

upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.⁴

Akibat hilangnya peran MPD pada saat itu sungguh berdampak luas karena salah satu fungsi dari MPD yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris. Dalam berbagai kelompok diskusi kenotariatan, terlihat adanya kekecewaan dan keprihatinan atas beberapa oknum Notaris yang telah lalai dan abai dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang kemudian berdampak pada banyaknya anggapan yang muncul bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidaklah profesional. Beberapa masalah yang terekam antara lain masalah internal, minimnya pengetahuan dan keterampilan hukum kenotariatan, kurangnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum, potensi adanya ketidak kompakn dalam menjalankan jabatannya dengan disinyalir adanya praktek "*perang harga*" yang berakibat terjun bebasnya harga ekonomis dari sebuah akta. Permasalahan internal jabatan Notaris tersebut kerap kali membuat posisi Notaris berada dalam permasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Tak sedikit juga yang mempertanyakan dimanakah peran organisasi Notaris dalam memperbaiki semua hal tersebut.

Kondisi tersebut diatas tentunya harus mendapat perhatian serius dari para Notaris dengan kesadaran penuh dan cita-cita untuk mengembalikan harkat dan martabat profesi Notaris. Berangkat dari realitas tersebut, maka kemudian

⁴ www.hukumonline.com, Pemeriksaan Notaris tak perlu persetujuan MPD, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, Pukul 18:34 WIB.

lahir UUJN terbaru sebagai pengganti peraturan undang-undang tentang jabatan Notaris yang terdahulu. Amandemen pada UUJN kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi profesi Notaris, dengan momen faktor baru yang disebut “Majelis Kehormatan Notaris” atau yang telah disingkat sebagai MPD.

Lahirnya kembali lembaga atau badan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris (MKN) telah ditanggapi positif oleh sebagian besar Notaris, namun **Tomson Situmeang** yang dalam hal ini kapasitasnya selaku advokat, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku Pasal 66 (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris, Ia merasa ketentuan tersebut berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum akan merosot dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan hilang. Maka berdasarkan anggapan tersebut, **Tomson Situmeang** kemudian mengajukan uji materiil atas Pasal 66 (1), (3), (4) UU Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 72/PUU-XII/2014 tersebut diatas menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa

pemohon yang berprofesi sebagai advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris.⁵

Demi memperkuat keberadaan MKN, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disingkat PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016), yang dimana di dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi dari MKN.⁶ Selanjutnya terkait dengan tugas dan daripada MKN wilayah juga turut diatur didalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan”

Dalam substansi Pasal 18 ayat 1 khususnya huruf b sebagaimana tersebutkan diatas, tidak secara jelas pengaturan mengenai tindakan atau perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh MKN selanjutnya bilamana telah menyetujui permintaan pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, yang seolah-

⁵ Majelis Kehormatan Notaris, www.indonesianotarycommunity.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 17:20 WIB.

⁶ Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; (Pasal 1 ayat 1 BAB I Ketentuan Umum PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016).

olah MKN tidak lagi memiliki tanggungjawab penuh yang berkelanjutan terhadap jalannya proses tersebut.

Menurut Penulis, bilamana MKN telah memberikan persetujuan bagi Notaris guna hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, maka sudah seharusnya MKN diwajibkan untuk turut melakukan pendampingan hukum kepada profesi Notaris guna memberikan perlindungan hukum serta pembelaan lainnya terkait dengan akta-akta yang telah dibuat hingga persoalan hukum yang dihadapi tersebut tuntas, apabila tidak dilakukan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan tugas dan fungsi MKN melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 18 ayat 2 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Sehingga perlindungan hukum yang demikianlah yang tidak muncul dalam Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yang kemudian justru muncul pada BAB V dalam subbab syarat pemanggilan Notaris pada Pasal 27, dengan isi Pasal yakni: "*Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik*", yang dimana dalam isi Pasal 27 tersebut tidak mewajibkan bagi MKN untuk melakukan pendampingan Notaris, terlebih lagi pendampingan tersebut hanya pada tahap proses pemeriksaan di hadapan penyidik, padahal dalam hal pemanggilan Notaris tidak hanya pada proses penyidikan saja, melainkan juga pada penuntutan dan proses

peradilan. Apabila hanya bertumpu pada Pasal 27 tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris tidak akan berjalan maksimal.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum di Kota Bengkulu sebagai obyek dari penelitian tersebut, serta menuangkannya ke dalam penulisan tugas akhir dalam bentuk tesis yang berjudul : **“Efektifitas Penerapan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris. (Studi Kasus di kota Bengkulu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat diangkat, yaitu :

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, Peneliti ingin mendapatkan sebuah penelitian yang selaras dengan permasalahan yang akan diteliti, karena

tujuan dilakukannya sebuah penelitian pada hakekatnya adalah untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai Peneliti dari penelitiannya.⁷ Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu;
- b. Untuk menemukan sebuah formulasi pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi kalangan Notaris dalam praktik, dan kalangan akademis yang memiliki kepentingan dalam hal perlindungan hukum maupun sebagai tambahan bagi kepustakaan.

b. Manfaat praktis

⁷ Soerjono Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm. 34.

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para Notaris, calon Notaris maupun kalangan akademis lainnya dibidang kenotariatan;
2. Memberikan masukan bagi para Notaris maupun MKN dalam mengantisipasi maupun menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam hal pemanggilan Notaris pada proses penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Peneliti, maka dapat ditemukan penelitian yang serupa dengan rincian penelitian secara garis besar yang dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama	Fak/Univ	Judul	Pembeda
1.	Andy Gunawan Tomagola	MKN/UB	Perlindungan Hukum Notaris melalui pengembalian disertai Pasal 66 di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris	Penelitian unu membahas perlindungan terhadap Notaris serta akibat hukumnya setelah perubahan Pasal 66
2.	Ratri Octaviana Ayuningtyas	MKN/UB	Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris terkait perlindungan terhadap Jabatan Notaris (Studi Pasal 66 dan 66A	Penelitian ini membahas tentang kewenangan penegak hukum dalam pemanggilan Notaris

			Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)	
3.	Mohammad Annas Nashirudin	MKN/UB	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris (Analissi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)	Penelitian ini membahas tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan kepolisian memanggil Notaris

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Dalam suatu Negara terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Maka lahirilah hubungan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara dan perlindungan hukum juga menjadi kewajiban bagi negara. Di Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :
“Indonesia adalah negara hukum”.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁸ Perlindungan hukum menurut **Satjipto Raharjo** yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakuka secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, **Philipus M. Hadjon** membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm.2.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.53.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.¹¹ Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persindangan, Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan

¹⁰ *Ibid*, hlm 1.

¹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 83.

keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Pada beberapa Undang-Undang, telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.¹² Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai kepercayaan. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidak dapat dengan bebas mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena hal tersebut akan mengakibatkan Notaris kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan.

⁹Muhammad Fajri, *Prespektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, <http://www.ptpn5.com>, diakses pada tanggal 18 juni 2013, pukul 11.00 WIB.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.

1.6.2. Teori Efektivitas Hukum

Secara Etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "*effective*" yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "*berhasil*" dalam bahasa Belanda "*effectief*" memiliki makna "*berhasil guna*".¹³ Menurut **Badudu dan Zain** dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia efektivitas berarti keefektifan, keefektifan artinya "sifat atau keadaan efektif". Efektif artinya mulai berlaku (tentang Undang-Undang), jadi efektivitas adalah sifat atau keadaan mulai berlakunya Undang-Undang,¹⁴ Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa *efektivitas* berarti *keefektifan*. *Keefektifan* artinya *hal mulai berlakunya (tentang Undang-Undang Peraturan)*.¹⁵ Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologinya memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum

¹³ Nurul Hakiim, *Efektivitas pelaksanaan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan lembaga Peradilan*, [www.badilag.net /data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf), diakses tanggal 15 Januari 2017, pukul 20:29 WIB.

¹⁴ J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm.371.

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm.374.

beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil, **Soerjono Soekanto** berpendapat, berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa : *"Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikatif berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsi-nya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".*¹⁶

Lebih lanjut, **Soerjono Soekanto** mengemukakan konsep pengaruh hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan. Keberhasilan mengatur sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan disebut *"positif"* atau *"efektif"*, sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perilaku yang menjauhi tujuan dinamakan *"negatif"* atau *"tidak efektif"*.¹⁷ Efektivitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun, keadaan tidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (Bandung: 1983), hlm.62.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm.7.

kadang-kadang tidak sama antara semangat kaidah dengan tulisan kaidah hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut **Antony Allot** suatu norma adalah efektif apabila terdapat kriteria: *Pertama*: jika tujuannya "*preventif*", ukuran keberhasilannya ditentukan oleh eksistensi dan penerapan yang dapat mencegah sifat yang tidak disetujui, kedua; bila tujuannya "*kuratif*", yaitu untuk memperbaiki suatu kekurangan atau kerusakan, keberhasilannya diukur dari sejauh mana kekurangan atau kerusakan dapat dihilangkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hukum yang efektif pada umumnya harus melaksanakan tujuannya, bila terjadi kegagalan harus ada cara yang mudah untuk memperbaikinya, bila diharuskan untuk menerapkan dalam suasana yang berbeda atau keadaan baru, hukum itu harus dapat menyesuaikan.¹⁹

Soerjono Soekanto mempersoalkan makna dari kata "tujuan". Apakah tujuan itu adalah keinginan atau kehendak pembentuk hukum atau tafsiran orang kemudian? Perlu ditegaskan terlebih dahulu apakah tujuan berarti pemahaman "*original*" dalam arti yang dipikirkan oleh para pembentuk hukum pada masa lampau atau kebutuhan-kebutuhan dan gagasan baru yang relevan bagi tujuan hukum? Jika tujuan berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum, sulit untuk mengidentifikasi keinginan atau kehendak pembentuk hukum, karena

¹⁸ *Ibid*, hlm.8.

¹⁹ Dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 179.

pembentuk hukum tidak hanya terdiri atau satu orang belaka, melainkan banyak orang yang bersilang pendapat.²⁰

Masalah tersebut sedikit banyak berkaitan dengan masalah penafsiran suatu tujuan tidak selalu identik dengan tujuan yang dirumuskan secara eksplisit oleh pernyataan dalam suatu aturan. Oleh karena itu, **Soerjono Soekanto** dengan mengintrodusir penelitian **Guldo Clabresi** memandang perlu pembedaan antara "tujuan langsung" dan "tujuan tidak langsung". "Tujuan langsung" berarti sikap tindak atau perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum, misalnya, suruhan atau larangan, atau kaidah hukum yang menyatakan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. "Tujuan tidak langsung" adalah dasar dari tujuan langsung, yaitu harapan yang ingin dicapai, apabila seseorang mentaati kaidah hukum tersebut.²¹

Gusfield membedakan antara tujuan kaidah hukum yang bersifat "simbolis" dengan yang bersifat "*instrumental*". Sebagaimana yang pernah dijelaskannya di dalam suatu artikel "*Moral Passage*", "*The Symbolic Process in Public Designations of Deviance*". Suatu kaidah hukum bersifat "*instrumental*" apabila tujuannya terarah pada suatu sikap tindak atau perilaku konkret, sehingga efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataanya. Kaidah hukum "*simbolis*" tidak tergantung kepada penerapannya, supaya hukum tadi mempunyai

²⁰ *Ibid*, hlm. 180.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 9.

efek tertentu dan kaidah hukum tersebut akan mempunyai arti oleh karena merupakan perlambang dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial²² Jika dihubungkan dengan arti tujuan pengawasan, maka "Tujuan langsung" atau "Tujuan instrumental" (**Guido Calabresi dan Gusfield**) dari pengawasan adalah suatu sikap tindak atau perilaku konkret yang dikehendaki dilakukan atau tidak dikehendaki oleh pengawas. Tujuan "tidak langsung" dan tujuan "simbolis" (**Guido Calabresi dan Gusfield**) dari pengawasan adalah bentuk pengawasan yang cukup baik kepada Notaris akibat dari pelaksanaan jabatan oleh Notaris yang keliru atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²³

Efektivitas dapat juga dipandang secara negatif. Sistem manapun akan memiliki sumber kelemahan. Langkah pertama adalah dengan mencari kelemahan atau penyakit yang ada dalam sistem. Semakin sedikit gangguan yang ditentukan, semakin dekat sistem itu kepada efektivitas, dan sebaliknya semakin banyak gangguan ditemukan, semakin dekat sistem itu kepada kegagalan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah

²²Dalam Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm.181.

²³ *Ibid*

pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.²⁴ Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris itu sendiri merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan jelas, meneliti bagaimana hukum berjalan dan bekerja di masyarakat.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007), hlm. 27-28.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 43.

Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.²⁷ Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan secara langsung kelapangan untuk mencari, mengamati, menggali, serta mengumpulkan data tentang hal yang terkait efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada tesis ini dilakukan di Kota Bengkulu, Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang mulai berkembang dalam kegiatan pembangunan termasuk kegiatan ekonomi. Dalam upacara hari jadi kota Bengkulu yang ke 298 di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Kelurahan Bentiring, Walikota Bengkulu **H. Helmi Hasan, S.E** menyatakan bahwa alokasi anggaran infrastruktur di masa pemerintahannya terbilang spektakuler, dimana kenaikan alokasi anggaran setiap tahunnya terus meningkat hingga 600% (enam ratus persen), terlebih lagi **Helmi Hasan** juga menyatakan bahwa untuk menjadi Kota Bengkulu yang maju dan berkembang maka seluruh elemen masyarakat harus mendukung penuh program Pemerintah Kota. Terutama program 8

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006), hlm. 14.

Tekad Bengkulu-ku yang tentunya menjadi program di awal kepemimpinan pemerintahnya.²⁸

Apabila memperhatikan kondisi perkembangan kota Bengkulu tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bilamana berbagai macam kegiatan pada proses transaksi yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian akan semakin meningkat, sehingga akan berdampak pada tingginya kebutuhan akan Notaris dalam pemenuhan pembuatan akta otentik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Negara.

Selain perkembangan kota Bengkulu menjadi salah satu alasan penentuan lokasi penelitian pada penelitian ini, menurut Notaris ML (inisial) selaku salah satu anggota MKN di kota Bengkulu menyatakan bahwa perkembangan kota Bengkulu diikuti dengan maraknya terjadi kasus hukum yang turut melibatkan Notaris sebagai pihak yang “dicurigai” telah melakukan pelanggaran hukum, mengingat hingga saat ini kebutuhan akan pembuatan akta otentik sangat meningkat.²⁹

Berdasarkan kondisi dan keadaan yang telah terpaparkan secara singkat tersebut diatas, maka Peneliti semakin tertarik untuk menjadikan kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian yang akan penulis teliti dalam penulisan ini.

²⁸ <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/03/18/walikota-beberkan-kemajuan-kota/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, pada pukul 22.02

²⁹ Hasil wawancara dengan Notaris MKN di Kota Bengkulu, 6 Mei 2017

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil rangkuman Peneliti selama melakukan observasi.

a. Jenis data penelitian ini, meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, diperoleh peneliti langsung dari subyek penelitian, pengumpulan data ini dilakukan melalui proses wawancara dan interview.³⁰

Dengan melakukan kegiatan langsung di beberapa kantor Notaris setempat yang pernah mengalami proses hukum dalam peradilan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

b. Sumber data penelitian ini, meliputi :

1. Sumber data primer, berupa wawancara langsung dengan responden yang terkait, yaitu :

- a. Majelis Kehormatan Notaris wilayah kota Bengkulu;
- b. Notaris yang memiliki kantor berdomisili di kota Bengkulu;
- c. Penyidik yang memiliki tugas dan kewenangan untuk beroperasi di kota Bengkulu;

2. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, dokumentasi perpustakaan dan situs website yang terdapat di internet. Data sekunder diperoleh dari :

- a. Perpustakaan pusat dokumentasi ilmu hukum yang berupa literatur buku-buku hukum;
- b. Situs internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan tesis ini menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) yang transkrip

wawancaranya akan dilampirkan dalam penelitian ini, yaitu catatan yang berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan beberapa pernyataan yang telah disusun terlebih dahulu, juga dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pernyataan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³¹ Metode pengumpulan data yang juga digunakan adalah observasi atau penelusuran dan pendokumentasian. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka dan dokumen/dokumentasi.

1.7.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Langkah selanjutnya, dari data primer dan data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan tesis ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu

³¹ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.

metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab dengan gambaran sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini, penulis/peneliti memaparkan konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Sejarah singkat dan Pengertian MKN. Adapun konsep-konsep yang dida[atkan tersebut di ambil menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli yang diambil dari berbagai literatur yang terkait dengan isu permasalahan hukum yang diangkat.

BAB III : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh peneliti tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka Bab III dalam penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi

profesi Notaris di kota Bengkulu, serta Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang.

BAB IV : Penutup Dan Kesimpulan

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1. Sejarah Terbentuknya Notaris di Eropa

Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnse Notariaat*” dan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni :

- a. diangkat oleh penguasa umum;
- b. untuk kepentingan masyarakat umum dan;
- c. menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum.³²

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

³² G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Hlm.3.

Nama Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu “*Notarius*”, yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan notarii karena berasal dari perkataan “*Nota Literaria*” yang berarti tanda-tanda tulisan atau character yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Pertama kalinya nama “*Notarii*” diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan **Cato** dalam senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan Notarii adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

Para pejabat istana tersebut menduduki berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut, pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para Notarii ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang.

Selain Notarii yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan “*Tabeliones*” yang merupakan orang-orang yang tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-

undang. Kelompok lainnya yaitu “*Tabulari*” yang merupakan golongan orang-orang yang menguasai tehnik menulis, yang mana tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para “*Tabulari*” ini merupakan pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip-arsip dari masyarakat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk golongan keahlian tulis-menulis tersebut diatas, yaitu *Notarii*, *Tabeliones* dan *Tabulari*, yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah *Tabulari*. Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara tersebut kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

2.1.2. Sejarah Terbentuknya Notaris di Belanda dan Indonesia

Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh **Raja Louis Napoleon**, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 *Ventose an XI* (16 Maret 1803) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau “*Wet op het Notarisambt*” (*Notariswet*) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.

Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasalpasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama **Melchior**

Kerchem yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). **Kerchem** ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya **Kerchem**, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing Notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap*

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).³³

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang *Honorarium* Notaris;

³³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, LN No.101 Tahun 2004. TLN No.700, Pasal.2.

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia, yang kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berlaku hingga saat ini.

2.1.3. Pengertian Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris

itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima masyarakat.³⁴

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas diuraikan secara jelas dalam pasal 15 UUN, yang menyatakan bahwa:

- “a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula :
 1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 3. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 4. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 7. membuat akta risalah lelang.
- c. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”³⁵

³⁴ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.45.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris, UU, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Pasal.15.

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Stbl.1860 Nomor 3 tentang Notaris

Reglement atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”³⁶

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut diatas, ternyata mempunyai kesamaan terkait dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

Dengan demikian hal tersebut diatas semakin mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat ataupun pegawai umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”³⁷

³⁶ G.H.S. Lumbun Tobing, *Op Cit*, hlm. 31.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal. 1868.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat dari keotentikan suatu akta tergantung dari bentuk akta tersebut yang diatur dalam undang-undang serta dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah hukum kewenangannya. Dalam hal ini menunjukkan kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang di maksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut maka oleh UUJN, diatur tentang kewajiban Notaris dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa :

- “1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

- sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali;
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) adalah akta :
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
 4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua;
 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap;

6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri;
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan , jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta dalam setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.”

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut :

- “a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

2.2. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

2.2.1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Peraturan

Perundang-Undangan

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang dirubah sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan MKN. Meskipun dibentuk MKN, namun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai MKN. Eksistensi MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang menentukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol No taris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Maksud dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 bahwa apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan pemanggilan atau kehadiran Notaris untuk hadir mempertanggung jawabkan atas fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka harus dengan persetujuan MPD.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan foto-kopi Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan MKN berwenang. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Hal ini berarti bahwa antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUN Tahun 2004 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUN Tahun 2014 letak perbedaannya adalah antara MPD dengan MKN.

2.2.2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 dan Pasal 67 UUN Tahun 2004 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga menentukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata

cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi tata kerja, dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 64 UUJN Tahun 2014 menunjuk pada wewenang MKN yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun hingga kini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum terealisasi, sehingga tidak diketahui secara jelas mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kohormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

2.3.1. Pengetian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”³⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 1 butir 2.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³⁹

2.3.2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHP dan siapa saja yang juga yang

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 380-381.

merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh** , wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas** , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Keduabelas** , wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketigabelas** , dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempatbelas** , dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Kelimabelas** , membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenambelas** , membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas** , wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas** , memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal

129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas** , Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh** , menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh satu** , menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP);
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP);
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP);
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁴⁰

⁴⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 92-93.

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibukota Provinsi Bengkulu. Bengkulu yang dahulu disebut *Bencoolen* merupakan kota pelabuhan tua Bencoolen yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad XVIII dan XIX. Pelabuhan Bengkulu (Pelabuhan Pulau Baai) berada sekitar 20 km dari Pusat Kota Bengkulu dan memiliki hinterland yang cukup luas dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agrobisnis, pertambangan dan industri.⁴¹

Kota ini terkenal karena pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 – 1942 pada masa penjajahan Belanda sampai pendudukan Jepang. Selain itu, di kota ini terdapat benteng peninggalan masa pendudukan Inggris, Fort Marlborough, yang terletak di tepi pantai.

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Bengkulu tidak saja dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan kota dalam lingkup regional, tetapi juga oleh keadaan internal kota itu sendiri. Perkembangan internal juga merupakan faktor yang mendorong pembangunan kota,

⁴¹ <http://info-kotakita.blogspot.co.id/2013/09/wilayah-kota-bengkulu.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2017, pukul 12.06 WIB.

karena tidak saja mempertimbangkan aspek-aspek potensial perkotaan, tetapi juga kemampuan dan keterbatasan yang ada. Penelaahan permasalahan wilayah kota dapat menjadi pertimbangan pokok yang menentukan kelayakan rencana pengembangan yang akan disusun.

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat $30^{\circ}45' - 30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14' - 102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.⁴²

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Bengkulu mempunyai ling-kungan pantai yang berhadapan dengan rezim energi (gelombang) kuat, yang dipengaruhi oleh swell dan diperkirakan menimbulkan erosi alami pantai akibat gelombang besar tersebut. Erosi alami pantai atau abrasi pantai ini berpotensi untuk menimbulkan sedimen pada garis pantai dan hal ini akan diperparah oleh suplai sedimen dari das besar yang terletak di sekitar Kota Bengkulu. Kondisi ini perlu dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan.

Secara administratif, Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah daratan sekitar 151,7 km², ditambah 1 pulau dengan luas 2 Ha dan

⁴² *Ibid*

lautan seluas 387,6 Km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 67 kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut :⁴³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
- c. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

3.1.2. Kota Bengkulu Sebagai Salah Satu Kota Berkembang

Proses perkembangan Kota Bengkulu sebagai salah satu kota berkembang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disingkat IPM) pada tahun 2016, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Bengkulu mengadopsi perubahan metodologi penghitungan

⁴³ *Ibid*

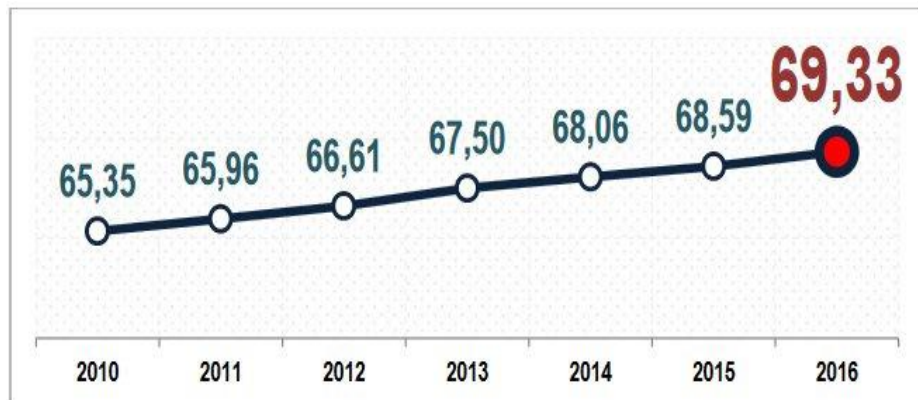
IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.⁴⁴

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan pertumbuhan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Provinsi Bengkulu meningkat dari 65,35 pada tahun 2010 menjadi 69,33 pada tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata tumbuh sebesar 0,99 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM Provinsi Bengkulu tumbuh 1,08 persen. Selama periode 2010-2016 IPM Provinsi Bengkulu terus menunjukkan kemajuan yang besar, walaupun pembangunan manusia Provinsi Bengkulu masih berstatus “sedang”.⁴⁵ Perhitungan sebagaimana tersebut dapat digambarkan dengan tabel grafik sebagai berikut :

⁴⁴ Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 36/06/17/II, 2 Juni 2017

⁴⁵ *Ibid*

Tabel 1. grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu, tahun 2010-2016



Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, maka terdapat 3 (tiga) kesimpulan terhadap perkembangan yang terjadi pada daerah Provinsi Bengkulu, yakni:⁴⁶

- a. Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM Provinsi Bengkulu, IPM Provinsi Bengkulu mencapai 69,33. Angka ini meningkat sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 68,59 atau dengan laju percepatan 1,08 persen;
- b. Status pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori “sedang”, dimana komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 68,56 tahun,

⁴⁶ Ibid

meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan pada 2015;

- c. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,37 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita masyarakat telah mencapai Rp. 9,492 juta pada tahun 2016, meningkat Rp. 369 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota yang berkembang akan selalu diikuti dan dipengaruhi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan profesi Notaris dalam mengakomodir perbuatan-perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata. Sehingga tidak heran jika pertumbuhan jumlah Notaris di kota Bengkulu kian meningkat dari 20 orang yang terdaftar pada tahun 2015-2016, kini mulai bertambah menjadi 29 orang pada tahun 2016-hingga pertengahan tahun 2017 ini.⁴⁷

⁴⁷Bengkulu.kemenkumham.go.id/attachments/article/551/DATABASE%20NOTARIS%20PROVINSI%20BENGKULU.pdf

3.2. Efektifitas Penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran MKN Dalam Melindungi Profesi Notaris di Kota Bengkulu

3.2.1. Perlindungan Terhadap Profesi Notaris

Perlindungan Hukum merupakan suatu yang telah diamanatkan oleh Negara dengan memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-4.⁴⁸ Perlindungan hukum tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Makna perlindungan hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan Negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Elemen pokok Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental right dalam kehidupan dimana

⁴⁸ penjelasan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menanti hukum dan konstitusi pada hakekatnya menanti imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya, hak-hak warga yang harus dihormati dan ditegakkan oleh pengemban kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang menurut **Azar usman** memberikan pengertian Perlindungan hukum sebagai berikut :

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak terkait, perlindungan hukum ini merupakan suatu perlindungan yang diberikan pemerintah guna melindungi dan menjamin hak-hak dan kepentingan-kepentingan para pihak sehingga akan timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak”.⁵⁰

Berdasarkan pendapat di atas arah perlindungan hukum yang disampaikan oleh **Azar Usman** dapat dikatakan bahwa perlindungan untuk melahirkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat yang telah sebelumnya dijanjikan oleh Negara. Perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum

⁴⁹ Rika Refianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjra Mada, (Yogyakarta, 2007), hlm. 12.

⁵⁰ Azar Usman, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar, 2007, hlm. 25.

memberikan jaminan dari hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan pihak lain. Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum maka hak subyek hukum yang dilanggar tersebut harus mendapat perlindungan hukum, termasuk bagi profesi Notaris.

Menurut Notaris ML (inisial) selaku salah satu anggota MKN di kota Bengkulu menyatakan bahwa sudah seharusnya Notaris dalam melaksanakan profesinya mendapatkan perlindungan hukum, baik oleh lembaga pendukung (MKN) ataupun oleh negara, fungsi daripada perlindungan hukum tersebut akan memberikan kinerja yang baik bagi Notaris dalam membuat akta-aktanya, karena Notaris akan merasakan aman (*safe*), meskipun Notaris tersebut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dalam praktiknya.⁵¹

Untuk mengetahui tingkat efektifitas perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada profesi Notaris di kota Bengkulu, maka perlu kiranya untuk terlebih dahulu mengetahui isi daripada Pasal 18 PM Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2016, yang secara jelas berbunyi :

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Notaris MKN di Kota Bengkulu, 2 Mei 2017

- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.”

Berdasarkan substansi Pasal diatas, perlindungan bagi profesi Notaris diberikan oleh MKN selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tersebut. Menurut Notaris ML (inisial) menyatakan beberapa pendapat terkait dengan perlindungan hukum yang selama ini telah diberikan kepada Notaris di Bengkulu, yaitu :⁵²

- a. Melakukan sistem pengawasan dan pembinaan kepada Notaris, maupun calon Notaris agar matang dalam berpraktik, serta teliti dan hati-hati dalam membuat setiap akta yang dibuatnya;
- b. Bilamana terdapat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik, maka MKN wilayah melakukan pengecekan ataupun meninjau ulang laporan tersebut agar pemeriksaan yang dilakukan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, jika tidak memiliki dasar hukum, maka pemanggilan tersebut tidak dapat dipenuhi;
- c. Memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam proses hukum, khususnya pada proses penyidikan, karena izin yang diberikan pada proses penyidikan

⁵² Hasil wawancara dengan Notaris MKN di Kota Bengkulu, 2 Mei 2017

inilah yang nantinya akan menentukan apakah Notaris tersebut akan melalui proses hukum yang panjang atau tidak terhadap kasus yang ditujukan kepada Notaris tersebut. Dalam memberikan persetujuan ataupun penolakan ini, kami (MKN) terlebih dahulu memeriksa seluruh berkas yang ada, yang kemudian kami klarifikasi kebenarannya terhadap yang bersangkutan. Apabila hasil dari klarifikasi telah terbukti kebenarannya, maka kami memberikan surat persetujuan kepada penyidik untuk melanjutkan proses hukum dengan menghadirkan Notaris yang bersangkutan, namun jika tidak terbukti maka kami (MKN) menerbitkan surat penolakan terhadap pemanggilan Notaris tersebut.

Menurut Bapak KM (inisial) selaku penyidik polda di kota Bengkulu, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh salah satu anggota MN diatas sudah benar, dan sekaligus menepis anggapan dari masyarakat maupun para profesi Notaris yang beranggapan bahwa ada unsur pemaksaan terhadap pemanggilan Notaris tersebut, dan ada beberapa point penting yang beliau sampaikan, yaitu :⁵³

- a. Kami (Penyidik Polda Kota Bengkulu) tidak pernah memaksakan kasus atau sengketa apapun yang melibatkan Notaris untuk harus di selenggarakan, jika memang tidak terbukti bersalah maka tidak akan dilanjutkan, tetapi apabila terbukti maka demi hukum kasus tersebut harus tetap diproses;

⁵³ Hasil wawancara dengan Penyidik Polda di Kota Bengkulu, 3 Mei 2017

- b. Bilamana proses tersebut hanya memerlukan Notaris sebagai saksi, atau hanya mendengarkan keterangan saksi dalam hal ini adalah Notaris, maka “terkadang” kami biasanya langsung memanggil Notaris yang bersangkutan untuk hadir tanpa melalui MKN.
- c. Selaku penyidik cukup terbantu dengan hadirnya MKN selaku lembaga yang memberikan perlindungan terhadap profesi Notaris, MKN selama ini tidak mempersulit proses penyidikan yang dilakukan penyidik guna mengetahui kebenaran formil yang sesungguhnya telah terjadi.

Menurut penulis, meskipun sebagian besar apa yang telah dilaksanakan oleh MKN maupun Penyidik tersebut diatas telah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, namun bukan berarti tindakan perlindungan hukum oleh MKN tersebut telah efektif dirasakan oleh beberapa Notaris yang pernah dipanggil untuk hadir dalam proses penyidikan, karena menurut Penulis, efektif atau tidaknya suatu tindakan perlindungan hukum tergantung dari apa yang diterima oleh yang diberikan perlindungan hukum tersebut.

Menurut MN (inisial) selaku Notaris di kota Bengkulu yang pernah dipanggil untuk hadir dalam proses penyidikan menyatakan, memberikan beberapa pendapat terkait sejauh mana perlindungan hukum yang telah diberikan MKN terhadap dirinya selaku pihak yang berprofesi sebagai Notaris, yaitu :

- a. Meskipun MKN telah melakukan tugas dan fungsinya selaku lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris, namun tidak ada langkah hukum selanjutnya yang diberikan kepada Notaris apabila Notaris tersebut diberi persetujuan untuk hadir dalam proses

penyidikan, seolah-olah MKN telah lepas tangan dan acuh tak-acuh setelah memberikan persetujuan kepada penyidik untuk menghadirkan Notaris. Padahal seharusnya MKN dalam melakukan perlindungan hukum harus melindungi Notaris tersebut hingga kasus yang menjeratnya berakhir, sepertihalnya melakukan pendampingan baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan hingga tahap proses peradilan, sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN lebih maksimal;

- b. Batasan perlindungan hukum yang diberikan MKN kepada profesi Notaris sebagaimana pada point diatas, sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang tidak secara spesifik memberikan penjelasan akan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN tersebut kepada profesi Notaris yang terlibat sengketa hukum. Namun lebih daripada itu, Notaris yang terlibat kasus hukum ingin dilindungi secara maksimal, bukan dilindungi dengan cara setengah-setengah.

Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap profesi Notaris perlu untuk dimaksimalkan, perlu disadari bahwa di dalam UUJN memang tidak memuat ketentuan pidana bagi Notaris, akan tetapi hal itu tidak berarti profesi Notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Dilihat dari kewenangannya maka diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:

- a. Pemalsuan dokumen atau surat (pasal 263 dan pasal 264 KUHP);

Contoh 1: Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan (“BPHTB”) dan surat setoran pajak (SSP);

Contoh 2: Membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Konsekuensi pembuatan akta seperti itu oleh notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak.

- b. Penggelapan (pasal 372 dan pasal 374 KUHP). Misalnya, penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien;

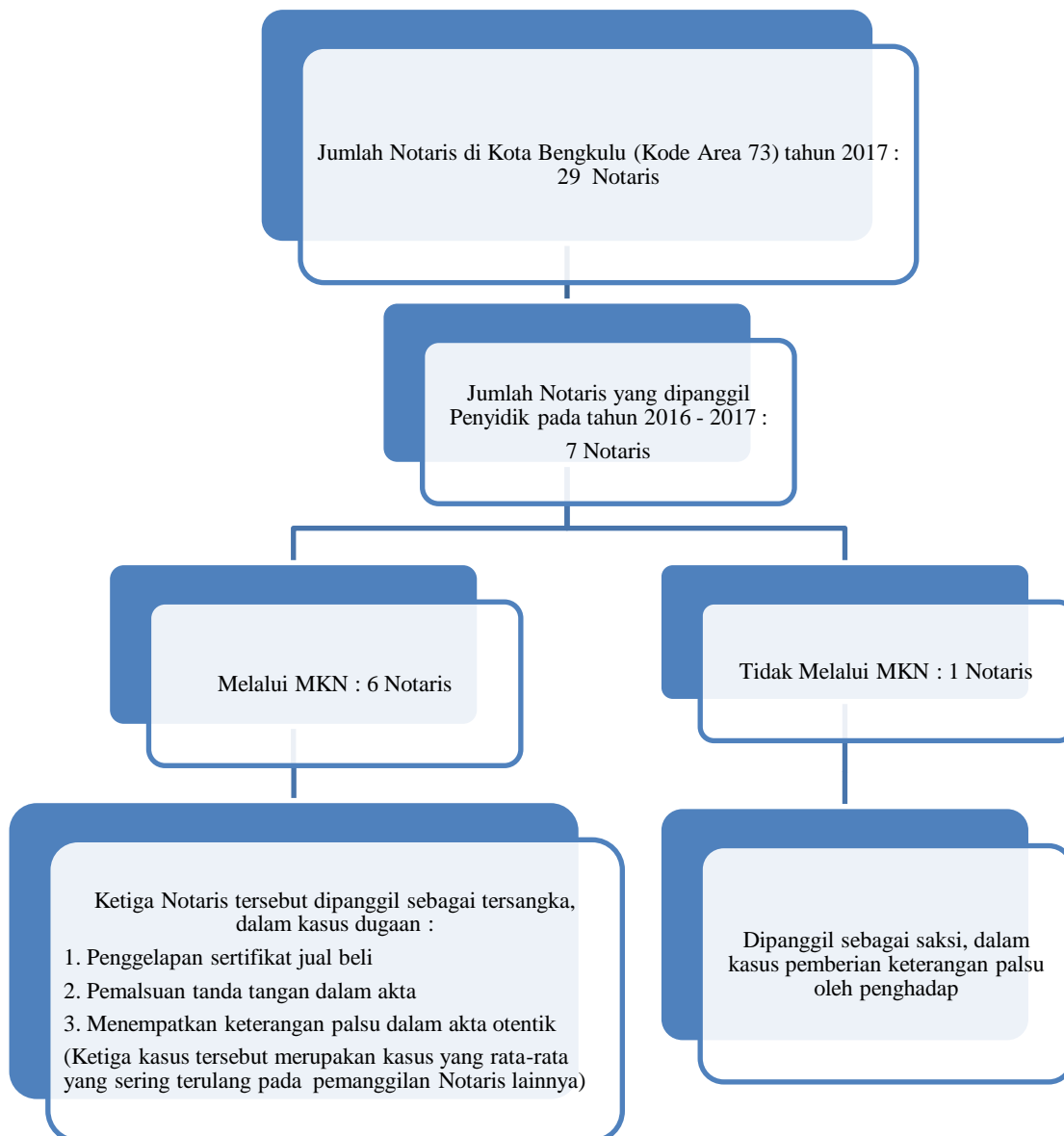
- c. Pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadaai kemungkinan terjadinya pencucian uang.

- d. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP).

Contohnya, kasus keterangan palsu yang diberikan seorang notaris di Jawa Timur yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.

Guna mengetahui secara lebih terperinci mengenai Notaris yang telah/pernah di panggil oleh penyidik dalam kasus-kasus tertentu di kota Bengkulu, maka dapat diuraikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2. Data Notaris yang dipanggil Penyidik. (Sumber : Data MKN Wilayah Bengkulu / Kemenkumham)



Dalam pemanggilan Notaris yang dilakukan penyidik pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) orang, 6 (enam) diantaranya melalui MKN, menurut Notaris MKN ML (inisial) menyatakan bahwa pemanggilan 6 (enam) Notaris tersebut telah melalui prosedur yang benar, yang dimana ke-enam dari Notaris tersebut telah diberikan persetujuan untuk hadir dalam proses penyidikan, akan tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang diberikan MKN setelah diberikannya persetujuan tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) Notaris lainnya yang dipanggil oleh penyidik tidak melalui MKN.⁵⁴

Apabila dideskripsikan lebih jauh mengenai pemanggilan Notaris berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut :

- a. Notaris NRA, S.H, M.Kn (inisial); Pemanggilan Notaris NRA berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris NRA dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan penggelapan sertifikat jual beli antara Tuan MHNDRA (inisial) dengan Tuan GSTI. Dugaan penggelapan sertifikat tersebut terjadi ketika Tuan MHNDRA secara sepihak ingin membatalkan perjanjian jual beli tersebut, sedangkan Tuan GSTI telah membayar setengah harga dari kesepakatan jual beli. Mengingat pembatalan jual beli tersebut hanya sepihak, maka Notaris NRA tetap menahan sertifikat yang telah diterima dan disimpannya hingga jual beli telah selesai, dengan maksud menjaga itikad baik dari para pihak, namun maksud baik tersebut justru diadukan kepada pihak kepolisian dikarenakan Notaris NRA tidak ingin memberikan sertifikat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Notaris MKN di Kota Bengkulu, 5 Mei 2017

tanah atas nama Tuan MHNDRA, sehingga dengan dasar aduan tersebut pihak kepolisian menduga telah terjadi penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh Notaris NRA.

Menurut Notaris NRA atas dugaan kasus penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh dirinya tersebut tidaklah benar, karena Notaris NRA hanya ingin mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurutnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN dalam kasus tersebut tidaklah maksimal, karena MKN hanya memberikan persetujuan pemanggilan, tanpa adanya pendampingan dari salah satu anggota MKN pada saat dilakukannya proses penyidikan oleh Penyidik.⁵⁵

- b. Notaris DSI, S.H (insisial); Pemanggilan Notaris DSI berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris DSI dipanggil oleh Penyidik dalam kasus yang serupa dengan yang dialami oleh Notaris NRA, yaitu dugaan penggelapan sertifikat jual beli atas sebidang tanah antara Tuan IKNDAR dengan Nyonya IST.

Menurut Beliau, dalam menanggapi kasus yang melibatkan dirinya sungguh sangat disayangkan, karena Notaris hanyalah menyimpan akta berdasarkan persetujuan para pihak pada saat pembuatan akta jual beli, apabila ada kehendak lain, maka diharapkan dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak juga. Sejauh ini MKN hanya bertindak dalam memberikan persetujuan untuk hadir dalam proses penyidikan tanpa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Notaris NRA di Kota Bengkulu, 5 Juni 2017

adanya pendampingan hukum, padahal pendampingan hukum tersebut sangatlah membantu Notaris bilamana “ditekan” oleh Penyidik.⁵⁶

- c. Notaris BMBNG, S.H (inisial); Pemanggilan Notaris BMBNG berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris BMBNG dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pada akta pemberian kredit antara Tuan YN (inisial) dengan Tuan AGS (inisial) qq. Bank MND (singkatan). Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensic, diketahui bahwa dalam akta pemberian kredit tersebut diketahui terdapat tanda tangan yang bukan milik Tuan YN. Menurut Notaris BMBNG, pemalsuan tanda tangan tersebut tidaklah dilakukan oleh dirinya maupun oleh para pegawainya, melainkan istri dari Tuan YN berdasarkan surat kuasa yang diberikan sendiri oleh Tuan YN, akan tetapi kedua pihak tidak mengakui adanya surat kuasa tersebut karena telah hilang, disinilah dirasa ada itikad tidak baik dari pihak Debitur dalam perjanjian kredit yang kemudian menyeret Notaris dalam kasus tersebut.

Menurut Notaris BMBNG, untuk menilai itikad baik ataupun tidak baik dari para penghadap tidaklah mudah, namun bilamana dikemudian hari diketahui bahwa adanya itikad baik dari penghadap maka seharusnya Notaris tidak dilibatkan, karena Notaris bukanlah para pihak dalam akta. Disinilah peran MKN sangat diperlukan Guna melindungi Notaris yang “diseret” kedalam kasus yang demikian, guna membantu Notaris

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Notaris DSI di Kota Bengkulu, 2 Juni 2017

yang bersangkutan memberikan pemahaman kepada Penyidik mengenai tugas dan fungsi profesi Notaris yang sebenarnya kepada Penyidik.⁵⁷

- d. Notaris INDH, (inisial) S.H., M.Kn; Pemanggilan Notaris INDH berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris INDH dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Kasus bermula ketika salah satu penghadap yaitu Nyonya SLV (inisial) beranggapan bahwa terdapat keterangan palsu dalam akta pembagian waris yang telah dibuatnya, karena dirinya merasa tidak pernah mengeluarkan argument tersebut untuk dimasukkan kedalam akta, sehingga menurut dirinya dengan adanya keterangan palsu tersebut telah merugikan dirinya. Notaris INDH telah menjelaskan mengenai keterangan tersebut, bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pegawainya dan berjanji akan memperbaiki akta tersebut dengan melakukan renvoi, akan tetapi penghadap tidak menerima toleransi dan melaporkan perihal tersebut ke pihak kepolisian.

Menurut Notaris INDH, apa yang telah menyeretnya kedalam kasus tersebut sangatlah disayangkan, karena hal tersebut merupakan kesalahan teknis yang dapat di diselesaikan secara kekeluargaan dengan pemberian renvoi, karena tidak ada maksud itikad tidak baik dalam pembuatan akta tersebut. Dalam proses pemberian ijin oleh MKN pun

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Notaris BMBNG di Kota Bengkulu, 5 Juni 2017

seharusnya dapat memdalam posisi kasusnya terlebih dahulu karena sesungguhnya kasus tersebut tidak perlu untuk dibesar-besarkan hingga jatuh pada proses penyidikan, jika kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, harusnya MKN menolah pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik.⁵⁸

- e. Notaris KDP, (inisial) S.H., M.Kn; Pemanggilan Notaris KDP berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris KDP dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, sama halnya yang dialami oleh Notaris INDH.

Menurut Notaris KDP sangatlah wajar bilamana terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan akta, termasuk kesalahan-kesalahan dalam memberikan keterangan pada isi akta, walaupun Notaris melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian, namun Notaris tak luput dari kesalahan sebagai manusia biasa, terlebih lagi jika kesalahan tersebut dilakukan oleh pegawai Notaris.

Notaris KDP berpendapat bahwa MKN haruslah turut memberikan penyuluhan akan fungsi dan kewajiban Notaris dalam pembuatan akta kepada Penyidik agar Penyidikpun mengerti dan tidak secara mentah-mentah menerima laporan dan menganggap semua kesalahan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Notaris.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Notaris INDH di Kota Bengkulu, 6Juni 2017

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Notaris KDP di Kota Bengkulu, 6 Juni 2017

- f. Notaris DY, (inisial) S.H., M.Kn; Pemanggilan Notaris DY berdasarkan persetujuan MKN, dalam hal ini Notaris DY dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, sama halnya yang dialami oleh Notaris INDH dan KDP.

Menurut Notaris DY, tidak sedikit Notaris terjerat kasus dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, khususnya di daerah kota Bengkulu. Dari semua kasus tersebut tidaklah 100% (seratus persen) merupakan kesalahan Notaris, karena sesungguhnya Notaris hanya mencantumkan keterangan dalam isi akta sesuai dengan kehendak para pihak, namun seringkali terdapat pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam membuat akta, yang kemudian turut menjerat Notaris untuk masuk kedalam persoalan tersebut. Bagi MKN sudah seharusnya melakukan antisipasi terhadap persoalan ini untuk melindungi Notaris yang secara jelas dan nyata tidak melakukan pemalsuan keterangan dalam akta otentik, agar MKN dapat membantu Notaris dalam memberikan penjelasan secara mendetail terhadap kasus tersebut pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Penyidik.⁶⁰

- g. Notaris JS (inisial), S.H., M.Kn; Pemanggilan Notaris JS tidak berdasarkan persetujuan MKN (tanpa melalui MKN), dalam hal ini Notaris KDP dipanggil oleh Penyidik dalam kasus dugaan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Notaris DY di Kota Bengkulu, 6 Juni 2017

menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan oleh penghadap.

Berbeda dengan pemanggilan Notaris yang sebelumnya, Notaris JS dipanggil oleh penyidik hanya sekedar memberikan keterangan sebagai saksi dalam mencari kebenaran bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh salah satu penghadap.

Notaris JS membenarkan bahwa dirinya dipanggil oleh penyidik hanya sebatas memberikan keterangan bahwa benar para penghadap telah meminta kepada dirinya untuk memasukkan keterangan-keterangan yang dianggap palsu kedalam akta otentik. Dalam pemanggilan tersebut Notaris JS tidaklah merasa keberatan dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik walaupun tidak melalui MKN.⁶¹

Menurut Penulis, meskipun dalam hal pemanggilan Notaris hanya sekedar meminta keterangan sebagai saksi, Penyidik haruslah melakukan pemanggilan melalui MKN, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka hal ini sangat disayangkan karena pemanggilan Notaris yang dilakukan tanpa melalui MKN telah bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya ketika Undang-Undang tentang MKN telah diberlakukan.

Terlebih lagi, apabila Notaris dipanggil Penyidik tanpa melalui MKN maka tidak ada tanggungjawab yang dapat diberikan oleh MKN yang dapat membuat Notaris tersebut rentan dengan “tuduhan-tuduhan”

⁶¹ Hasil wawancara dengan Notaris DY di Kota Bengkulu, 6 Juni 2017

yang tidak benar yang justru dapat membuat Notaris tersebut semakin terjerumus pada kasus yang tengah terjadi, mengingat profesi Notaris sangatlah berpotensi dalam melakukan tindak pidana.

Dengan mencermati hasil dari proses wawancara yang disertai dengan data sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada profesi Notaris tidaklah maksimal karena hanya memberikan persetujuan dan penolakan atas pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penyidik, tanpa adanya pendampingan hukum lebih lanjut. Meskipun dalam pasal 27 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur mengenai pendampingan oleh MKN kepada Notaris yang tengah diperiksa, namun demikian tidak ada frasa yang mewajibkan bagi MKN untuk melakukan pendampingan, sehingga sesuai kiranya dengan hasil penelitian bahwa tidak adanya inisiatif dari MKN untuk melakukan pendampingan terhadap MKN yang tengah diberikan dikarenakan selama ini tidak diwajibkan oleh Undang-Undang, terlebih lagi pendampingan yang disebutkan oleh Undang-Undang hanya sebatas pada proses pemeriksaan di hadapan penyidik saja. Padahal apabila kita cermati di dalam Pasal 18 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa tugas yang wajib dilakukan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris adalah menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta, yang dimana kedua tindakan perlindungan hukum tersebut dapat dilakuan ketika melakukan pendampingan bagi Notaris yang sedang menempuh proses hukum setelah adanya persetujuan

pemanggilan Notaris, karena tidak sedikit dari beberapa Notaris yang pernah dipanggil dalam proses penyidikan “di paksa” untuk membongkar rahasia daripada isi akta hanya demi kepentingan penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya penegasan yang lebih mendetail dan mendalam secara tegas pada undang-undang, khususnya pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 terkait dengan tindakan pendampingan hukum yang diberikan oleh MKN terhadap Notaris yang telah disetujui untuk hadir dalam proses penyidikan hingga proses hukum tersebut benar-benar telah selesai, dan diharapkan untuk kedepannya MKN tidak lagi bersikap pasif, tetapi akan dituntut untuk bersikap aktif guna menjaga kehormatan dan martabat dari jabatan Notaris.

3.3. Pengaturan Tentang Perlindungan Profesi Notaris yang Diberikan Oleh MKN Guna Menjamin Kepastian Hukum Dimasa yang Akan Datang

Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaturan yang ada di dalam hukum itu sendiri, sehingga perlu untuk dipahami terlebih dahulu secara bersama-sama mengenai fungsi ataupun hakikat dari tujuan hukum. Menurut **Sajipto Rahardjo**, Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran

yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.⁶²

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu se buah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu: (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.⁶³

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 19.

⁶³ *Ibid*, hlm. 17

perubahan dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi.⁶⁴

Perubahan terhadap hukum dapat dilakukan melalui pembangunan hukum, yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada perkembangan mutakhir; dan sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bukanlah suatu yang tidak mungkin terjadi dan mustahil bilamana hukum dirubah ataupun disempurnakan demi menjamin kepentingan dan melindungi masyarakat, termasuk dalam hal ini perubahan pada PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN, khususnya pada Pasal 18 yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan MKN kepada profesi Notaris.

Menurut ID (inisial) yang menjadi salah satu Notaris di kota Bengkulu mengatakan bahwa selama ini memang perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN hanya sebatas pembinaan dan pengawasan terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dan bilamana ada pemanggilan Notaris oleh penyidik, MKN hanya memberikan persetujuan atau tidaknya terhadap pemanggilan tersebut setelah diadakannya rapat atau musyawarah. Sejauh ini belum ada MKN yang memberikan perlindungan hukum hingga tahap akhir dalam proses peradilan, setidaknya memang MKN harus memberikan pendampingan hukum bagi Notaris

⁶⁴ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2002), Hlm. 16.

yang senyatanya sedang menjalani proses penyidikan, dan setidaknya perihal tersebut juga diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja, fungsi, dan tugas dari lembaga MKN.⁶⁵

Urgensi melakukan penambahan substansi pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 akan berdampak besar bagi profesi Notaris, tentunya dalam hal bentuk perlindungan hukum yang akan diterima oleh Notaris yang tengah menghadapi kasus hukum.

Adapun pendapat Penulis terhadap pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang yaitu, dengan memberikan beberapa tambahan substansi pokok dalam Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang pendampingan profesi Notaris oleh MKN dalam tahap penyidikan, penuntutan ataupun proses peradilan. Substansi tersebut perlu kiranya ditambahkan guna menjamin kepastian hukum terhadap seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan MKN guna melindungi profesi Notaris, mengingat profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dan bekerja untuk Negara.

Meskipun urgensi penambahan substansi tersebut lebih ditekankan untuk dimasukkan dalam PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, bukan berarti bahwa penambahan substansi sebagaimana yang dimaksud juga dapat dilakukan pada UUJN, namun demikian mengingat bahwa pengaturan mengenai MKN lebih spesifik telah diatur dalam PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Notaris ID di Kota Bengkulu, 5 Mei 2017

maka menurut Penulis terhadap penambahan substansi tersebut sudah seharusnya dan layak untuk ditambahkan kedalam peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang MKN tersebut, yakni dalam PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Seperti yang telah diketahui juga bahwa pengaturan pendampingan oleh MKN tersebut telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) dalam Bab V tentang syarat pemanggilan Notaris, namun menurut Penulis substansi Pasal tersebut masih belum maksimal mengingat tidak adanya frasa untuk mewajibkan MKN melakukan pendampingan bagi Notaris dan pendampingan dalam Pasal tersebut hanya pada proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Dengan demikian, sebagai bentuk konkrit yang dapat diberikan oleh Penulis berdasarkan beberapa pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penambahan substansi pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB III

TUGAS DAN FUNSI

Pasal 18

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
 - c. dalam rangka memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan

pendampingan hukum kepada Notaris tersebut hingga proses hukum selesai;

- d. dalam rangka memberikan penolakan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut kepada publik demi menjaga nama baik Notaris yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Dengan menambahkan substansi Pasal 18 pada huruf c dan d sebagaimana yang tersebutkan diatas, maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada Notaris, baik bagi Notaris yang disetujui untuk dipanggil maupun yang tidak disetujui. Substansi penambahan tersebut juga saling berkesinambungan dengan Pasal 18 ayat 2 yang menjelaskan maksud dari tugas MKN itu sendiri, sehingga semakin menegaskan bahwa MKN memang sudah seharusnya dapat membela profesi Notaris secara maksimal apabila profesi Notaris tersebut tengah dipersengketakan.

Perlindungan yang maksimal memang dirasa perlu diberikan kepada profesi Notaris dan diperkuat di dalam peraturan perundang-undangan, terlebih lagi Menurut **Syafran Sofyan**, jabatan Notaris merupakan jabatan yang sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam UUJN, namun sebagian tugas Negara di bidang keperdataan dilimpahkan kepada Notaris, dan Notaris sangat besar perannya bagi bangsa dan Negara, khususnya di dalam memberikan kepastian

hukum, baik dalam perjanjian, kontrak, dan pengikatan lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap.⁶⁶

Penambahan frasa pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM sebagaimana yang disebutkan diatas diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum yang diterima oleh profesi Notaris, namun juga dapat memberikan kepastian hukum tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris, khususnya dalam hal ini yaitu MKN wilayah kota Bengkulu.

Selain menambahkan frasa di dalam peraturan perUndang-Undangan sebagaimana disebutkan diatas, menurut Penulis perlu kiranya juga untuk membuat suatu nota kesepahaman antara Notaris ataupun MKN wilayah dengan penyidik dalam hal pemanggilan Notaris. Hal ini sebagaimana juga dimaksudkan oleh **Habib Adjie** yang menyatakan bahwa Untuk menghindari kesewenang-wenangan polisi dalam memanggil Notaris, INI ataupun MKN dapat membuat nota kesepahaman dengan polisi. Dalam nota itu diatur pemanggilan Notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik. Surat panggilan harus mencantumkan dengan jelas status sang Notaris, alasan pemanggilan, dan polisi harus tepat waktu. Pada hakekatnya, Notaris harus hadir memenuhi panggilan

⁶⁶ <http://www.indonesianotarycommunity.com/perindungan-hukum-terhadap-profesi-Notaris/>, oleh Syafran Sofyan, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, Pukul 14.30 WIB

yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian halnya, polisi bisa datang ke kantor Notaris bersangkutan.⁶⁷

Sementara kalau status notaris adalah saksi, dia bisa saja tak disumpah. Kecuali cukup alasan, Notaris yang bersangkutan boleh tidak hadir ke persidangan. Dalam nota kesepahaman itu, Notaris juga meminta agar mereka hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu. Kalaupun kelak akan diperiksa penyidik pembantu, alasannya harus patut dan wajar.⁶⁸

Dalam nota kesepahaman tersebut juga perlu ditatur klausul tentang Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sesuai pasal 54 KUHAP, dimana Notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus MKN saat diperiksa polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 dalam waktu secepatnya.

Nota kesepahaman itu memperkuat aturan pemanggilan notaris dalam Pasal 66 UUJN. Pasal itu menentukan, jika polisi atau penyidik hendak memanggil Notaris atau mengambil minuta akta haruslah mendapat persetujuan dari MKN wilayah. Sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur didalam peraturan perUndang-Undangan.

⁶⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21201/ketika-notaris-dipanggil-polisi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 15.00 WIB

⁶⁸ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dalam penulisan Tesis ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1. Efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016

Terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu terbukti masih belum optimal. Mengingat perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN wilayah Bengkulu hanyalah sebatas memberikan persetujuan dan penolakan atas pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, tanpa adanya pendampingan hukum lebih lanjut. Padahal apabila kita cermati lebih lanjut Pasal 18 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa tugas yang wajib dilakukan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris adalah menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

4.1.2. Pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh

MKN guna menjamin kepastian hukum pada prakteknya hingga saat ini masih belum optimal, sehingga guna mengoptimalkan penerapan aturan tersebut perlu kiranya untuk menambahkan frasa ayat c dan d pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu : c. dalam rangka

memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan pendampingan hukum kepada Notaris tersebut hingga proses hukum selesai; d. dalam rangka memberikan penolakan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut kepada publik demi menjaga nama baik Notaris yang bersangkutan.

4.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan Penulis di atas, maka Penulis hendak mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

4.2.1. Bagi MKN sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada profesi Notaris, khususnya yang memiliki wilayah kerja di kota Bengkulu, mengingat tidak sedikit Notaris kota Bengkulu yang dipanggil oleh penyidik guna memenuhi proses penyidikan, sehingga sangat dibutuhkan suatu proses pendampingan hukum yang dapat diberikan oleh MKN dalam proses penyidikan tersebut.

4.2.2. Bagi Pemerintah seharusnya turut memperhatikan pentingnya kepastian hukum yang terdapat dalam suatu perUndang-Undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap profesi Notaris,

mengingat Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan dari sebagian tugas negara di bidang hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azar Usman, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar, 2007.
- Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta; :Penerbit buku Kompas 2007.
- G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hadjon, Pjillipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.

_____, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.

Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.

Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Rika Refianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjra Mada, Yogyakarta, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

_____, *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.

_____, *Penegakan hukum*, Bandung: 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 36/06/17/II, 2 Juni 2017.

Situs Internet :

<http://info-kotakita.blogspot.co.id/2013/09/wilayah-kota-bengkulu.html>

<http://www.indonesianotarycommunity.com/perindungan-hukum-terhadap-profesi-Notaris/>, Syafran Sofyan.

<http://www.seputarukm.com/pembangunan-ekonomi-di-indonesia-tahun-tahun-terakhir>, 22 Februari 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21201/ketika-notaris-dipanggil-polisi>.

<http://www.ptpn5.com>, Muhammad Fajri, *Prespektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*.

www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf, Nurul Hakiim, *Efektivitas pelaksanaan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan lembaga Peradilan*.

www.hukumonline.com, *Pemeriksaan Notaris tak perlu persetujuan MPD*.

www.indonesianotarycommunity.com, *Majelis Kehormatan Notaris*.

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/03/18/walikota-beberkan-kemajuan-kota/>.

[Bengkulu.kemenkumham.go.id/attachments/article/551/DATABASE%20NOTARIS%20PROVINSI%20 BENGKULU.pdf](http://Bengkulu.kemenkumham.go.id/attachments/article/551/DATABASE%20NOTARIS%20PROVINSI%20BENGKULU.pdf)

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia, 2012.

Mohammad Zain, J. S. Badudu-Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1984.